

Pemilihan Presiden 2004 dan Kualitas Demokrasi

Bambang Cipto

The direct president election in 2004 have a unique aspect according to the change of democratization, not just because this is the first time people choose directly their own president, but this is also a transition of democracy in Indonesia which will show how good the quality of our democracy. In this election candidate should have "the parallel views" with people feeling and people need, and to articulate what people want. Here will appear how important the use of media to measure who deserve for president among the candidates, is he or she well understand the condition of their society such as poverty, health, unemployment, etc? Or they just use the people as a vehicle to get what they want.

Pemilihan presiden tahun 2004 bersifat unik karena dua hal. Pertama, pemilihan ini merupakan pemilihan presiden langsung yang pertama di Indonesia. Kedua, pemilihan presiden langsung dilakukan pada saat Indonesia sedang berada dalam transisi menuju demokrasi. Keunikan ini sudah tentu akan berdampak pada lingkungan politik utamanya, yakni, kualitas demokrasi. Tulisan ini akan mencoba memprediksi dampak pemilihan presiden langsung terhadap kualitas demokrasi.

Pemilihan presiden langsung merupakan merek dagang sistem pemilihan presiden di Amerika walaupun sesungguhnya Presiden Amerika tidak pernah dipilih secara langsung dalam arti calon dengan suara terbanyak merupakan pemenang pemilihan presiden. Di Amerika, pemilih sesungguhnya adalah *electoral college* yang merupakan representasi dua partai politik utama, yakni, partai Republik dan Demokrat. Suara rakyat atau *popula-*

tion votes yang bersifat langsung hanya difungsikan sebagai alat untuk merebut *electoral college* atau secara teknis disebut *electoral votes*. Akibatnya, calon presiden dengan *population votes* yang besar belum tentu memenangkan pemilihan presiden karena yang dihitung adalah *electoral votes*nya.¹ Sehingga dalam pemilihan presiden Amerika tahun 2000 lalu Al Gore dikalahkan oleh Bush walaupun jumlah suara rakyat Gore lebih besar dari jumlah suara rakyat yang dikumpulkan Bush karena pada pemilihan tahap kedua lewat *electoral college* Bush berhasil mengalahkan Gore. Walaupun protes berdatangan karena adanya tuduhan negatif akan tetapi tradisi kuno yang masih dipegang teguh bangsa Amerika membuat Gore rela menerima kekalahan. Kendati

¹ Cipto, *Politik dan Pemerintahan Amerika*, Lingkaran, Yogyakarta, 2003, hal. 46-47.

sistem pemilihan ini sudah dianggap kuno oleh banyak kalangan akan tetapi bangsa Amerika selalu menemui kesulitan untuk mengubah tradisi yang telah berumur tersebut.

Sistem pemilihan presiden yang benar-benar langsung dipraktekkan Perancis sejak akhir dekade 50-an. Di Perancis presiden benar-benar dipilih secara langsung tanpa melalui tahapan lebih tinggi sebagaimana di Amerika. Pemilihan presiden di Perancis diikuti oleh banyak partai politik sehingga tidak jarang ada dua calon yang mendapatkan jumlah pemilih yang sama banyak. Untuk menghindari konflik maka Perancis memberlakukan pemilihan ulang antar calon jumlah perolehan suara sama besar yang dikenal sebagai *run off*.

Negara-negara demokrasi baru pada umumnya mengikuti pola Perancis karena kondisi yang relatif mirip. Pada umumnya negara-negara demokrasi baru memiliki jumlah partai yang banyak (sistem multipartai) karena masih lemahnya pelembagaan partai. Disamping itu, mereka memandang sistem pemilihan presiden di Amerika kurang demokratis karena masih menyisakan pemikiran kolonial yang memberikan hak istimewa kepada masyarakat lapisan atas untuk memilih presiden.² Oleh karena itu, pemilihan model Perancis saat ini banyak ditiru di negara-negara Amerika Latin.

Kualitas demokrasi dapat diukur dari (1) regularitas pemilihan presiden langsung; (2) keterwakilan partai politik didalamnya; (3) serta persamaan persepsi antara politisi dan pemilih; (4) sudah tentu kondisi lingkungan politik yang sehat dan stabil merupakan syarat lain untuk mengukur sejauh mana kualitas demokrasi sebuah pemilihan presiden langsung dinegara demokrasi baru. Kualitas demokrasi ini penting karena

menyangkut perubahan tingkat kedewasaan pelaku politik dan pemilih. Dimasa depan kualitas demokrasi pemilihan presiden akan membantu meningkatkan kualitas demokrasi sistem politik secara keseluruhan.

Regularitas Pemilihan Langsung

Tingkat regularitas pemilihan presiden langsung dapat membantu proses peningkatan kualitas demokrasi. Semakin sering pemilihan presiden langsung dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh masyarakat politik semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi presiden. Regularitas dapat membantu masyarakat memprediksi apa yang akan terjadi sebelum dan sesudah pemilihan presiden. Pola yang terbentuk berkali-kali dalam jangka waktu lama akan mengurangi resiko politik dan bisnis yang sering muncul karena ketidakpastian yang terjadi pada sistem politik yang jarang melaksanakan pemilihan presiden langsung.

Keteraturan selama beberapa periode pemilihan presiden dengan sendirinya membentuk persepsi yang kuat dimasyarakat tentang manfaat dan dampak positif masa jabatan presiden yang bersifat tetap.³ Masa jabatan yang tetap dan secara

² Dimasa lalu Amerika, hanya para pembayar pajak (*tax payer*) yang boleh ikut dalam pemilihan. Bahkan hak pilih untuk wanita baru diberikan pada tahun 1920-an dan orang kulit hitam baru berhak memilih pada tahun 1964. Pemilihan Presiden Amerika moderen dengan demikian masih mengandung sisa-sisa unsur-unsur diskriminasi yang sangat kuat walaupun mereka mengklaim sebagai pelopor demokrasi didunia.

³ Matthew Soberg Shugart and Scott Mainwaring, "Presidentialism and Democracy in Latin America: Rethinking the Terms of the

teratur berganti-ganti selama beberapa periode akan memperkuat demokrasi presidensial.

Dalam konteks ini pemilihan presiden langsung tahun 2004 merupakan sebuah eksperimen pertama yang merupakan pondasi bagi pengembangan demokrasi presidensial dimasa mendatang. Sukses pemilihan ini akan meningkatkan rasa percaya dari para politisi dan pemilih sekaligus. Pemilihan presiden langsung ini dengan sendirinya menjadi penentu awal bagi perbaikan pemilihan presiden dimasa depan. Sekalipun demikian perlu juga diingat bahwa minimnya pengalaman Indonesia dalam pemilihan presiden langsung membuat orang harus berhati-hati untuk tidak terlalu optimis bahwa peristiwa ini akan merupakan keberhasilan yang sesungguhnya dari proses demokratisasi yang sedang dijalani bangsa Indonesia. Persyaratan yang sulit dalam pemilihan presiden langsung dinegara demokrasi baru memang sering mengundang rasa pesimisme di atas.⁴ Namun, persyaratan ini memang diperlukan khususnya dinegara-negara yang sangat plural dengan berbagai perbedaan etnis, bahasa, agama, bahasa. Dengan persyaratan yang ketat diharapkan akan muncul pemimpin yang diterima secara luas dan bukan sekedar mewakili segelintir kelompok tertentu saja.

Dengan demikian pesimisme bahwa pemilihan presiden akan gagal mempertahankan demokratisasi adalah sikap yang tak diperlukan karena nyaris mustahil mengharap pengalaman pertama dalam pengembangan institusi politik yang sedemikian vital akan berhasil dengan sempurna. Oleh karena itu, sikap optimis jauh lebih penting untuk menghentikan keraguan sementara kalangan bahwa pemilihan presiden langsung akan berakhir dengan kegagalan.

Disamping itu, optimisme ini juga akan bermanfaat untuk mendorong peluang tumbuhnya harapan publik yang lain dalam sektor lain. Sukses pemilihan presiden langsung diharapkan akan menular pada tradisi di daerah, khususnya di daerah dalam mana pilkada masih dilakukan di badan perwakilan. Bahkan penentangan pemilihan gubernur secara langsung di daerah tertentu diharapkan akan berkurang dengan keberhasilan pemilihan presiden secara langsung.

Keterwakilan Partai Politik

Kualitas demokrasi kedua adalah tingkat keterwakilan partai politik dalam pemilihan presiden langsung. Pada sistem pemilihan Presiden Amerika bisa dikatakan hanya ada dua partai yang bersaing ketat walaupun jumlah presiden cukup banyak sebelum pemilihan berlangsung. Namun, pada saat nominasi calon presiden, sekitar empat bulan sebelum pemilihan, hanya ada satu calon dari masing-masing partai Demokrat dan Republik.

Akan tetapi, pada sistem multipartai seperti Brasil atau Indonesia partai peserta pemilihan presiden cukup banyak atau lebih dari dua sebagai akibat dari banyaknya partai yang mencalonkan presiden. Semua peserta pemilihan DPR berharap untuk dapat mengikuti pemilihan presiden tanpa kecuali. Bahkan, partai dengan perolehan

Debate," dalam Scott Mainwaring and Matthew Soberg Shuggart, *Presidentialism and Democracy in Latin America*, Cambridge. Cambridge University Press, 1999, hal. 17.

⁴ Donald L. Horowitz, "Membandingkan Sistem-sistem Demokrasi," dalam Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, diterjemahkan oleh Ibrahim R. dkk, Jakarta: Rajawali Pers, 1995, hal. 213.

suara kecil di DPR bertekad untuk ikut dalam pemilihan presiden langsung. Alasan yang mereka ajukan adalah bahwa pemilihan presiden langsung di Indonesia baru pertama kali dilaksanakan sehingga tak ada yang tahu hasilnya. Alasan lain, dalam pemilihan DPR 1999 tak ada partai yang mampu meraih suara mayoritas sehingga tak ada jaminan akan muncul partai dengan suara mayoritas dalam pemilihan presiden langsung tahun 2004. Alasan-alasan ini memang logis dan memperkuat argumentasi tentang kewajaran banyaknya partai yang berniat terjun dalam pemilihan presiden langsung.

Dalam konteks sulitnya mendapatkan suara mayoritas ini orang dapat belajar, misalnya, dari pengalaman negara lain seperti Brasil. Dengan banyaknya partai peserta pemilu maka diperlukan mekanisme koalisi sebagai sarana untuk menjangkit sebanyak mungkin suara dari pemilih. Ada dua negara penting yang memiliki pengalaman unik dalam pengembangan budaya koalisi. Jerman dimasa lalu pernah mengalami masa suram dalam pengembangan budaya koalisi khususnya dipihak partai sosialis. Ketika partai sosialis Jerman (SPD) selalu gagal merebut suara pemilih maka partai ini segera menghapus citranya sebagai partai kiri yang berbau Marxis. Dalam bahasa saat ini SPD menggeser posisi ideologinya dari ekstrim kiri ke tengah atau ke ideologi moderat. Resep lama ini diterapkan kembali dalam pemilihan 1998 yang melambungkan Gerard Schroeder pada posisi Kanselir Jerman bahkan hingga dua kali.

Pelajaran penting ini kemudian diikuti oleh negara-negara demokrasi baru di Amerika Latin. Salah satu negara yang menerapkan resep Jerman ini adalah Brasil. Di negeri ini, sejak awal dekade lalu partai dan politisi berlomba untuk merias diri

mereka sebagai partai moderat. Setelah lima belas tahun bereksperimen dengan transisi demokrasi elit partai mulai menyadari bahwa rakyat tak mungkin dijejali terus dengan ideologi yang kosong. Oleh karena itu, sejak awal dekade 90-an mereka mulai memikirkan cara untuk mengubah strategi guna merebut suara dengan cara yang lebih efektif. Mereka membangun koalisi dengan partai-partai yang sepadam dan mulai menjual gagasan-gagasan kreatif tentang nasib dan masa depan bangsa. Kreatifitas yang mirip eksperimen SPD Jerman ini memang kemudian menghasilkan presiden-presiden baru sekalipun jumlah perolehan kursi di parlemen terlalu kecil untuk bertarung dengan partai dengan perolehan yang lebih besar. Dua kali Cardoso memenangkan pemilihan presiden (1994 dan 1998). Bahkan presiden Lula yang empat kali mencalonkan diri pun akhirnya mencicipi kursi presiden setelah melakukan berbagai perubahan dan adaptasi strategi kampanye pemilihan presiden langsung.

Dengan kata lain, pemilihan presiden di negara multipartai secara substansial berbeda dengan pemilihan presiden langsung pada sistem dua partai seperti Amerika. Pada sistem multipartai prinsip-prinsip dasar parlementerisme masih diperlukan baik sebelum maupun sesudah presiden terpilih, yakni, kesadaran akan pentingnya budaya koalisi. Dengan prinsip dasar ini keterwakilan partai tetap terjaga sementara prinsip pemilihan presiden langsung pun terpenuhi yakni berlangsungnya proses pemilihan seorang kepala eksekutif oleh rakyat secara langsung. Disini kualitas demokrasi multipartai tetap terjaga dan terpelihara hingga perubahan esensi sistem kepartaian dimasa depan.

Sangat disayangkan bahwa koalisi adalah barang asing bagi Indonesia karena besarnya tingkat egoisitas elit politik. Elit

politik di Indonesia cenderung menekankan pendekatan kekuasaan dalam menjalin hubungan dengan sesama elit partai. Bagi para elit berpolitik adalah merebut dan mempertahankan posisi ketua. Mereka sangat terpengaruh oleh budaya politik yang secara intensif dikembangkan Soeharto bahwa menjadi seorang ketua atau pejabat merupakan segalanya dan memang tujuan utama dari kehidupan politik. Oleh karena itu, bagi para politisi semua bentuk kehidupan politik dipersepsikan sebagai jalan menuju kekuasaan yang bakal menjamin kesejahteraan diri dan keluarganya. Obsesi terhadap jabatan inilah yang menjadi pintu masuk bagi virus korupsi yang hingga kini masih tetap merajalela.

Mispersepsi terhadap realitas kehidupan politik ini hingga kini masih membekas pada sebagian besar politisi dan nyaris menjadi motivasi utama mereka dalam politik. Kondisi psikologis ini tercermin pada persepsi mereka tentang fungsi koalisi. Sebagian besar politisi menganggap koalisi dibangun berdasarkan jumlah suara di DPR. Mereka hanya bersedia berkoalisi setelah perolehan suara peserta pemilu di DPR telah pasti jumlahnya. Mereka berasumsi dengan jumlah suara yang jelas mereka lebih percaya diri dalam menentukan partai mana yang akan dijadikan sebagai rekanan koalisi. Pola berpikir ini secara teoritis dapat dikategorikan sebagai model koalisi yang memaksimalkan kekuasaan semata-mata. Koalisi ini secara teoritis mengabaikan sama sekali isu-isu yang berkembang di masyarakat atau menganggap masyarakat pemilih tidak terlalu penting. Mereka berangkat dengan asumsi bahwa semakin besar jumlah perolehan suara di DPR semakin besar pula peluang untuk memenangkan pemilihan presiden langsung. Akibatnya, persoalan-persoalan

besar dan mendesak untuk diselesaikan kurang mendapat perhatian partai karena partai cenderung mengandalkan perolehan dari suara di DPR sebagai basis untuk penentuan koalisi.

Di negara-negara demokrasi presidensial yang telah mapan praktek pemilihan presiden langsung sering merupakan upaya kolektif untuk merumuskan persoalan dasar bangsa dalam skala nasional dan memberi kesempatan kepada para calon-calon presiden untuk menawarkan solusi sesuai dengan program partainya. Pemilihan presiden langsung dengan demikian berkaitan erat dengan upaya kolektif bangsa dalam menemukan solusi atas persoalan yang sedang mereka hadapi.

Dalam konteks ini keterwakilan partai dalam pemilihan presiden tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mereka terhadap isu-isu fundamental yang sedang berkembang di masyarakat. Dalam negara-negara demokrasi baru yang telah beberapa kali menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung kesadaran terhadap isu-isu sentral di masyarakat ini pada umumnya sangat tinggi. Tingkat sensitifitas calon presiden terhadap isu-isu yang berkembang sering menjadi tolok ukur keberhasilan calon dalam pemilihan presiden. Oleh karena itu, para calon presiden pada umumnya menjadikan isu-isu kampanye sebagai pengikat antar partai yang berniat berkoalisi. Dengan kata lain, keterwakilan partai dalam koalisi selain diikat oleh ideologi juga diikat oleh kebersamaan mereka dalam menghadapi persoalan-persoalan yang sedang berkembang di masyarakat. Partai berkoalisi dengan demikian bertujuan untuk membangun kekuatan bersama guna menemukan solusi atas persoalan yang sedang berkembang di masyarakat. Dengan pendekatan ini partai-partai tidak terlalu

khawatir dengan jumlah perolehan mereka di DPR karena bukan menjadi tolok ukur utama dalam membangun koalisi.

Kebersamaan Persepsi Calon Presiden dan Pemilih

Dalam pemilihan presiden langsung persoalan dasar yang dihadapi oleh para calon presiden adalah kemampuan mereka mengidentifikasi persoalan yang sedang berkembang di masyarakat. Kemampuan ini sangat esensial fungsinya dalam menentukan kegagalan atau keberhasilan kampanye calon presiden. Popularitas calon presiden biasanya dapat dilihat pada kecermatan dirinya dalam mengidentifikasi persoalan dan mengolahnya sebagai bahan kampanye presiden.

Kepiawaian calon presiden, sudah tentu dengan dukungan tim, dalam merumuskan persoalan bangsa mencerminkan tingkat kelekatan calon presiden dan harapan masyarakat luas. Jika perumusan masalah yang dilakukan calon presiden mampu mendekati batas-batas harapan masyarakat pemilih maka bisa dikatakan bahwa calon presiden tersebut akan mampu merebut hati dan pikiran rakyat pemilih. Disinilah sesungguhnya esensi pemilihan presiden langsung.⁵ Seorang calon presiden diharapkan membaca dengan cermat dan cerdas harapan yang masing mengambang didalam pikiran publik. Calon presiden dituntut untuk mampu menggali gagasan, pikiran, tuntutan, dan harapan masyarakat luas dan menemukan jawaban yang tepat terhadap persoalan-persoalan tersebut.

Kemampuan merumuskan keinginan publik akan menghasilkan kebersamaan persepsi calon presiden dan masyarakat pemilih. Tumbuhnya interaksi psikologis antara calon presiden dan publik dalam bentuk persepsi gabungan keduanya

merupakan kunci sukses perbaikan kualitas demokrasi.

Sebaliknya, jika antara calon presiden dan masyarakat pemilih tidak terjalin hubungan psikologis yang terjadi adalah pembentukan jarak antara keduanya. Secara teoritis semakin lebar jarak psikologis antara calon presiden dan masyarakat pemilih akan menciptakan jebakan otoriter bila kelak presiden terpilih. Dalam pemilihan presiden lewat lembaga legislatif sebagaimana dipraktekkan Indonesia hingga 1999 jebakan otoriter tersebut dalam kenyataan terlihat pada pemerintahan Soeharto hingga Gus Dur. Kegagalan membangun persepsi bersama antara calon presiden dan masyarakat pemilih selama Soeharto berkuasa melahirkan persepsi bersama yang dipaksakan. Soeharto selalu mengklaim bahwa dirinya dipilih oleh MPR yang merupakan representasi seluruh rakyat Indonesia. Namun segala bentuk intimidasi dan tekanan politik terhadap anggota MPR dan siapapun yang terlibat dalam proses pemilihan presiden memperkuat asumsi bahwa sesungguhnya Soeharto menghindari upaya penciptaan persepsi bersama antara dirinya sebagai calon presiden dan masyarakat pemilih diluar MPR. Runtuhnya rezim Soeharto merupakan puncak dari kebekuan hubungan dirinya dengan masyarakat pemilih yang tak pernah dilibatkan secara penuh dalam proses pemilihan presiden.

Pemilihan presiden langsung tahun 2004 memang sangat diharapkan agar

⁵ Kasus pemilihan Presiden Iran tahun 1997 menarik untuk dicermati karena dalam pemilihan ini calon presiden Khatami tidak didukung rejim konservatif namun berhasil memenangkan pemilihan karena kreatifitasnya dalam memahami harapan publik pemilih.

terbentuk hubungan psikologis antara calon presiden dan masyarakat pemilih. Sangat disayangkan bahwa calon-calon presiden sangat sedikit memiliki kesempatan untuk berdialog secara intensif dengan publik pemilih. Masa kampanye yang terbatas tidak mungkin memberi kesempatan kepada para calon presiden untuk membangun persepsi bersama dengan rakyat pemilih. Dalam pemilihan presiden langsung di Amerika, para calon telah berkampanye intensif bahkan dua tahun sebelum pemilihan berlangsung. Panjangnya masa perkenalan dengan publik ini sangat penting karena publik Amerika memang menghendaki calon yang benar-benar teruji karena mereka tidak ingin mendapatkan presiden yang tak memiliki komitmen yang jelas serta kemampuan memimpin yang handal.

Walaupun demikian, bukan berarti bahwa tak ada jalan lain untuk mengantisipasi aturan kampanye yang masih kaku di Indonesia saat ini. Keberhasilan calon presiden membangun jembatan psikologis dengan para pemilih akan tergantung pada kemampuan para calon dalam mengambil manfaat dari masa kampanye yang sangat pendek. Dalam kasus Indonesia barangkali diperlukan kerja ekstra keras dari para calon presiden untuk merebut hati dan pikiran para pemilih. Asumsi ini mensyaratkan kesediaan para calon presiden untuk benar-benar membenamkan diri mereka ke dalam kehidupan rakyat pemilih agar mendapatkan sebanyak mungkin dukungan. Hanya dengan cara ini pemilihan presiden langsung dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Sebaliknya, jika calon presiden hanya mengandalkan jumlah perolehan suara di DPR sebagai titik tolak dan modal utama kampanye presiden maka bisa diduga sejak awal bahwa kecenderungan ini tidak akan mampu mendongkrak kualitas demokrasi.

Sebaliknya, proses demokrasi akan mengalami perlambatan karena keengganan calon presiden untuk mengembangkan model-model kampanye yang lebih sejuk, lebih merakyat, dan melibatkan sebanyak mungkin rakyat pemilih.

Lebih jauh, calon presiden sesungguhnya dituntut untuk mampu merumuskan agenda besar dan konkret yang merupakan cerminan dari keprihatinan masyarakat saat ini. Isu-isu strategis seperti masalah pengangguran, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi adalah persoalan-persoalan riil yang akan tetap menghantui harapan rakyat banyak. Sayang sekali bahwa hingga saat ini belum terlihat adanya upaya serius dari para calon presiden untuk memberi perhatian sungguh-sungguh pada isu-isu tersebut. Padahal diberbagai negara demokrasi baru persoalan diatas telah menjadi agenda utama pemilihan presiden, karena langsung menyangkut nasib rakyat banyak. Kualitas demokrasi pemilihan presiden akan terpengaruh oleh kemampuan calon dalam merumuskan dan mencari solusi persoalan ini. Semakin sedikit isu ini dijadikan agenda para calon, semakin besar isu-isu ideologi menentukan jalannya kampanye. Jika ini masih terus terjadi maka kemungkinan besar pemilihan presiden 2004 tak akan menghasilkan presiden yang berkualitas karena ia lebih banyak dipilih karena pertimbangan ideologi semata-mata.

Etika Kampanye

Persoalan lain yang bakal menentukan kualitas demokrasi pemilihan presiden langsung dan merupakan sisa masa lalu adalah sejauh mana pelaksanaan kampanye mendatang akan mengedepankan etika sebagai rujukan. Etika kampanye ini menjadi penting karena dalam kampanye pemilihan presiden yang diwarnai dengan

kekerasan politik akan menodai makna demokrasi. Dalam praktek kekerasan dalam kampanye tidak berhenti dengan berakhirnya kampanye. Bahkan paska kampanye bentuk-bentuk kekerasan politik mengalami perubahan dan menciptakan korban lain.

Mengingat pada tahun 2004 akan berlangsung dua kampanye pemilihan (DPR dan Presiden) bisa diduga bahwa kwantitas kekerasan kemungkinan akan mengalami peningkatan dibanding kampanye dimasa lalu yang hanya berlangsung sekali untuk pemilihan anggota legislatif.⁶ Prospek peningkatan kekerasan politik ini perlu dijadikan agenda bersama antar partai sebagai bentuk tanggung-jawab mereka sebagai motor penggerak proses demokrasi.

Dalam konteks ini, peran para calon presiden diharapkan mampu menciptakan iklim yang sehat dan tertip dalam masing-masing partai. Bersama-sama dengan KPU dan Panwaslu para calon presiden diharapkan melakukan sosialisasi lebih lama tentang kemungkinan pecahnya kekerasan politik selama kampanye berlangsung. Oleh karena itu, sesungguhnya aturan kampanye yang sangat ketat seharusnya ditinjau kembali agar para calon dapat melakukan sosialisasi lebih lama karena besarnya potensi kekerasan yang mungkin timbul dalam kampanye mendatang.

Disamping itu, sebagaimana disebutkan diatas, persoalan-persoalan yang diangkat para calon presiden akan ikut menentukan kualitas kampanye presiden. Dengan menjadikan isu-isu ideologis sebagai tema utama kampanye maka gesekan antara partai akan semakin besar karena sifat ideologis yang memang mudah menimbulkan perbedaan pendapat yang sering berakhir dengan kekerasan politik.

Sementara itu jika para calon bersedia melakukan terobosan dengan mengangkat

isu-isu yang lebih konkret dan membantu mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan rakyat banyak kemungkinan akan didengar oleh publik lebih besar. Semakin banyak orang mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dibicarakan oleh calon akan semakin kecil mereka menjadikan kampanye sebagai ajang kekerasan fisik karena tumbuhnya harapan yang lebih baik bagi diri dan keluarganya. Etika kampanye dengan demikian berhubungan erat dengan pesan-pesan yang disampaikan para calon. Dengan kata lain, pesan-pesan yang lebih kongkrit dan menyentuh kebutuhan dasar rakyat banyak akan membantu menumbuhkan etika kampanye yang sehat.

Money Politics adalah persoalan lain yang kemungkinan besar akan muncul dalam pemilihan presiden dalam negara-negara demokrasi baru, termasuk Indonesia. Sebagai contoh, di Meksiko partai berkuasa menggunakan model *money politics* ini untuk membujuk para pemilih. Sebagaimana partai berkuasa dinegara lain, mereka selalu menekankan bahwa sukses pembangunan merupakan bukti kehebatan partai berkuasa. Mereka menyediakan berbagai kebutuhan dasar para pemilih dalam jumlah cukup besar. Menegaskan bahwa sukses pembangunan tak bisa lepas dari jasa partai yang berkuasa, bahkan mengancam kemudahan-kemudahan yang diterima masyarakat akan hilang jika mereka tidak memilih calon presiden dari partai berkuasa. Upaya membeli suara dengan pemberian kebutuhan pokok disertai ancaman ini dapat mengurangi kualitas demokrasi karena partai oposisi sering tidak memiliki kelebihan dana sebagaimana partai

⁶ Donald K. Emmerson, "A Year of Voting Dangerously?" dalam bentuk lebih ringkas makalah ini akan terbit dalam *Journal of Democracy* edisi January 2004.

berkuasa. Akan tetapi, dampak efektif *money politic* tergantung pada kemampuan capres lain dalam meyakinkan masyarakat.⁷

Media Massa

Dalam pemilihan presiden langsung peran media massa sangat penting khususnya bagi capres dari partai oposisi. Persoalan dasar capres dari partai oposisi adalah keterbatasan dana kampanye. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di negara-negara demokrasi baru, dengan n.eniru budaya rejim otoriter, presiden berkuasa memanfaatkan sarana milik pemerintah untuk mendukung kampanye. Persoalan ini sering sulit dikendalikan karena dalam kunjungan resmi pun seorang calon presiden yang sedang berkuasa dapat memanfaatkannya untuk melakukan kampanye terselubung. Mengingat kenyataan tersebut diperlukan kerja ekstra keras bagi capres partai oposisi untuk dapat bersaing dengan capres partai berkuasa. Dalam konteks inilah pemanfaatan media massa secara intensif dan cerdas akan memberi keunggulan bagi capres dari partai oposisi. Sukses Vincente Fox dalam merebut kursi presiden Meksiko yang selama berpuluh-puluh tahun dikuasai PRI ditopang oleh keberhasilan partainya dalam mengelola media massa.⁸

Kesimpulan

Pemilihan presiden langsung tahun 2004 diperkirakan tidak akan mampu meningkatkan kualitas demokrasi dalam arti sepenuhnya. Pemilihan presiden ini merupakan perhelatan besar pertama oleh bangsa ini sehingga sulit mengharapkan bahwa pemilihan ini akan meningkatkan kualitas demokrasi. Sekalipun demikian, paling tidak peristiwa ini akan mendorong

bangsa Indonesia untuk meneruskan upaya meningkatkan proses demokrasi paska-pemilihan presiden.

Persoalan koalisi barangkali merupakan isu paling krusial karena menyangkut mekanisme utama dalam pembentukan pemerintahan akan tetapi sangat sedikit mendapatkan perhatian serius dari elit partai karena belum tumbuhnya persepsi umum tentang fungsi utama koalisi.

Disamping itu, para elit partai dan calon presiden hingga kini masih kurang peka terhadap isu-isu sentral yang dihadapi masyarakat seperti pengangguran, hutang luar negeri, dan rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Persoalan inilah sesungguhnya merupakan taruhan utama pemilihan presiden diberbagai negara demokrasi. Sayang, bahwa di Indonesia isu-isu yang berkembang masih berputar sekitar isu-isu ideologi yang selama ini menjadi salah satu penyebab mengapa kampanye selalu rawan kekerasan politik. Oleh karena itu, hingga kesadaran tentang hubungan antara pemilihan presiden dan pemulihan ekonomi menjadi kesadaran utama para calon, kualitas demokrasi tidak akan meningkat lebih jauh.

Akan tetapi, jika para capres bersedia berpikir lebih strategis dan mengembangkan model-model kampanye yang komprehensif bukan tidak mungkin kompetisi pemilihan presiden mendatang akan meningkatkan kualitas demokrasi. Secara khusus, manajemen media massa yang baik dan efisien akan ikut serta meningkatkan kualitas demokrasi. ●

⁷. Andreas Schedler, "The Democratic Revelation," *Journal of Democracy*, October 2000, hal. 13

⁸. David A Shirk, "Vincente Fox and the Rise of PAN," *Journal of Democracy*, October 2000, hal. 25

Daftar Pustaka

- Cipto, Bambang 2003, *Politik dan Pemerintahan Amerika*, Yogyakarta: Lingkaran.
- Shugart, Matthew Soberg and Mainwaring, Scott, 1999, *Presidentialism and Democracy in Latin America: Rethinking the Terms of the Debate*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Arend Lijphart, 1995, "*Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*", diterjemahkan oleh Ibrahim R. dkk, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andreas Schedler, 2000, "The Democratic Revelation", *Journal of Democracy*, October.
- David A Shirk, October 2000, "Vincente Fox and the Rise of PAN", *Journal of Democracy*.

